

Aplikasi Model Persamaan Struktural pada Ketimpangan Pendapatan Daerah

Novya Muharrika Izzah Rifai^{1*}, Muhammad Syarkawi Rauf²

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, novya.izzha@gmail.com

²Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia, msrauf@yahoo.com

E-mail korespondensi: novya.izzha@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the variables of transfer funds, human development index, and minimum wage on income inequality either directly or indirectly through economic growth in South Sulawesi Province by using secondary data obtained from the relevant agencies. The data used are time series data from 2002 to 2020 and analyzed using the Structural Equation Model (SEM) method with the IBM SPSS AMOS 22 software. The results show that the transfer fund and minimum wage have no significant effect on income inequality either directly or indirectly through economic growth. The human development index has a directly significant effect on income inequality and has no indirectly significant effect on income inequality through economic growth in South Sulawesi Province.

Keywords: *Income Inequality, Economic Growth, Transfer Fund, Human Development Index, Minimum Wage*

ABSTRAK

Kajian ini ditujukan untuk meninjau variabel dana perimbangan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas terkait. Adapun data yang digunakan yaitu data time series tahun 2002 sampai 2020 dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan aplikasi IBM SPSS AMOS 22. Hasil kajian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Adapun indeks pembangunan manusia dengan cara yang langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum

PENDAHULUAN

Setidaknya terdapat dua isu penting yang kerap kali muncul secara bersamaan pada diskusi mengenai perbaikan perekonomian, yaitu pertumbuhan dan ketimpangan. Analogi yang paling tepat menggambarkan relasi keduanya adalah diibaratkan sebagai sebuah benda dengan bayangannya. Bagaikan dua sisi mata uang yang sama, sehingga hampir mustahil membicarakan pertumbuhan tanpa menghadirkan ketimpangan. Dalam hal ini, hasil pembangunan didominasi oleh segelintir kecil orang kaya, sedangkan orang miskin yang jumlahnya sangat banyak memperoleh bagian yang sangat sedikit. Fenomena ketimpangan ini selanjutnya melahirkan sebuah idiom yang demikian populer, yaitu, “sedikit menguasai banyak, sedangkan yang banyak menguasai sedikit.”

Pemerataan atas distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor kesejahteraan. Menurut Arsyad (2010)¹ tujuan penting dari pembangunan ialah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilihat dari meningkatnya perbaikan perekonomian dan meratanya distribusi pendapatan. Adanya ketimpangan pada pendapatan menyebabkan wilayah yang ketimpangan pada pendapatannya tinggi dikategorikan miskin, walaupun tidak dapat dikatakan seluruh penduduknya miskin karena tingginya tingkat ketimpangan pada pendapatan (Dao, 2013)².

Sejauh ini, diskursus relasi peningkatan ekonomi dengan ketimpangan berlangsung sangat dinamis. Terjadi demikian karena relasi keduanya memang tidak sederhana, sehingga terdapat tataran empiris yang sulit dipahami dan bahkan kerap kali menimbulkan kontroversi (Yang dan Greaney, 2017)³. Beberapa peneliti menemukan relasi kedua variabel berkorelasi positif dan beberapa lainnya menemukan relasi yang negatif. Relasi positif antara lain dikemukakan oleh Lundberg dan Squire (2003)⁴; Wahiba dan El Weriemmi (2014)⁵. Mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi perbaikan perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pada pendapatan dan atau sebaliknya. Tetapi berbeda bagi Panizza (2002)⁶, yang menemukan relasi negatif, di mana perbaikan perekonomian dapat mengurangi ketimpangan pada pendapatan, namun tidak signifikan.

Apabila dibandingkan pada wilayah Indonesia bagian barat serta timur, dari segi sumbangan untuk pembentukan PDB, kawasan Indonesia bagian barat tetap mendominasi dibandingkan kawasan Indonesia timur. Misalnya saja sumbangan pulau Jawa sejak 1982 hingga tahun 2020 masih berada di atas angka 50 persen. Terdapat pada tahun 1982, Pulau Jawa

menyumbang 51 persen dan terjadi peningkatan menjadi 57,55 persen terdapat tahun 2020 tanpa mengalami penurunan di bawah angka 50 persen sedangkan kurang lebih 40 persen disumbangkan oleh lima pulau lainnya. Ketimpangan di kawasan timur Indonesia lebih tinggi dengan rata-rata Indeks Gini sebesar 0,385, sedangkan Indonesia bagian barat sebesar 0,364 dari kurun waktu tahun 2011 hingga 2017 (Yuniasih, 2019)⁷

Pulau Sulawesi merupakan pulau paling maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia dengan rata-rata peningkatan ekonomi sebesar 7,61 persen setiap tahun selama delapan tahun terakhir sejak tahun 2012 hingga 2019, sekaligus pulau yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDB dari kawasan Timur Indonesia. Tidak hanya itu, di tahun 2020 pada saat wabah Covid-19 menyerang, Pulau Sulawesi justru tumbuh di angka 0,23% dibanding pulau Indonesia bagian barat yang mengalami kontraksi.

Hal tersebut tentu tak lepas dari sumbangan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang di kawasan timur Indonesia. Perbaikan perekonomian provinsi Sulawesi Selatan dalam 16 tahun terakhir tercatat mampu mencapai rata-rata di atas 6 persen. Terdapat tahun 2012 hingga 2020 Perekonomian Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup baik dengan laju perbaikan perekonomian rata-rata 6,9 persen, dimana angka ini terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan laju perbaikan perekonomian nasional. Nilai output (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan juga terbesar di antara provinsi-provinsi lain dalam Pulau Sulawesi. Meskipun begitu, tingginya perbaikan perekonomian Sulawesi Selatan juga dibarengi dengan ketimpangan pada pendapatan.

Perbaikan perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2002 hanya sebesar 4,08 persen selanjutnya naik menjadi 6,92 persen pada tahun 2019. Secara umum perbaikan perekonomian Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, akan tetapi dari tahun ke tahunnya terjadi peningkatan yang berfluktuasi. Selama 19 tahun terakhir, ketimpangan pada pendapatan yang diukur dengan Indeks Williamson di Sulawesi Selatan pada tahun 2002 sebesar 0,54 dan selanjutnya naik di tahun 2019 sebesar 0,70. Nilai indeks ini telah mencapai tingkat terjadinya kesenjangan yang tinggi dan selama 19 tahun terakhir kesenjangan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan nilai kesenjangan tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0,75. Hal ini sebagaimana laju perbaikan perekonomian yang terdapat setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, namun berdasarkan data kesenjangananya justru tidak mengalami perbaikan.

Masalah kesenjangan kerap kali dikaitkan dengan perbaikan perekonomian, sebab beberapa ekonom mengatakan bahwa perbaikan perekonomian merupakan penyebab terjadinya kesenjangan. Tingginya sebuah perbaikan perekonomian akan menyebabkan kesenjangan melebar. Tetapi beberapa ekonom lainnya juga mengatakan perbaikan perekonomian akan mendorong penurunan ketimpangan pada pendapatan. Kuznet (1971)⁸ mengatakan bahwa di proses awal pembangunan, kesenjangan akan terjadi peningkatan sampai terdapat satu titik dimana terjadi perkembangan teknologi serta industrialisasi sehingga kesenjangan tersebut akan menurun. Hal lain berdasarkan teori pembangunan ekonomi Neoklasik, mengemukakan bahwa peningkatan ekonomi dalam jangka panjang akan mengakibatkan konvergensi, yang artinya pendapatan perkapita daerah berkembang akan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah maju, sehingga kesenjangan akan semakin menipis terdapat pada dua daerah tersebut.

Kasus kesenjangan di provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa perbaikan perekonomian dan kesenjangan tampak berjalan paralel. Ketika perbaikan perekonomian terjadi peningkatan kesenjangan juga ikut meningkat, begitupun sebaliknya. Hal ini memberikan arti bahwa peningkatan peningkatan ekonomi justru tidak konsisten dalam memberikan efek terhadap penurunan kesenjangan di Sulawesi Selatan.

Kesenjangan juga dapat dilihat dalam bentuk perkembangan PDRB perkapita antar kabupaten dan kota. Pada tahun 2002, PDRB perkapita Kota Makassar misalnya sebesar Rp7,2 juta, sementara daerah lain seperti Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Jeneponto memiliki PDRB perkapita masing-masing sebesar Rp900 ribu dan Rp1,9 juta. Pada tahun 2013, Kota Makassar kembali menjadi terdepan dalam peringkat PDRB perkapita yakni dengan jumlah PDRB sebesar Rp54,6 juta, selanjutnya Kabupaten Luwu Timur dengan PDRB perkapita sebesar Rp48,3 juta. Sementara untuk daerah yang paling rendah PDRB perkapitanya masih ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yakni dengan jumlah sebesar Rp12,5 juta dan jumlah ini masih sangat jauh tertinggal dari dua daerah tertinggi jumlah PDRB perkapitanya.

Pada tahun 2020, PDRB perkapita masing-masing daerah tampak melejit. Kota Makassar menjadi daerah yang memiliki PDRB perkapita paling tinggi yaitu sebesar Rp78 juta rupiah, selanjutnya disusul oleh Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan masing-masing dengan PDRB perkapita sebesar Rp53,3 juta dan Rp50 juta. Sementara daerah yang paling kecil PDRB perkapitanya ditempati oleh Kabupaten Gowa dengan PDRB

perkapita sebesar Rp17,8 juta, selanjutnya disusul oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka Rp18,3 juta.

Selain kesenjangan yang semakin melebar yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson serta gambaran PDRB perkapita. Ketimpangan pada pendapatan antardaerah juga dapat dilihat dari sumbangan daerah dalam pembentukan PDRB Sulawesi Selatan tahun 2020 yang masih dipegang oleh Kota Makassar sebesar 36,71 persen, Kabupaten Bone 6,70 persen dan Kabupaten Luwu Timur 5,14 persen dan 51 persen disumbang oleh 21 daerah. Di antara 21 daerah tersebut hanya 5 daerah yang sumbangannya di atas 3 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena struktur perekonomian khususnya Kota Makassar yang umumnya didorong oleh sektor tersier yang paling besar mewujudkan nilai tambah dibandingkan sektor pertanian, juga elastisitas untuk penyerapan tenaga kerja yang berada pada sektor ini menjadi lebih besar.

Diskusi di kalangan para ahli ekonomi mengenai kesenjangan sangat erat kaitannya dengan persoalan sistem redistribusi untuk sumber daya pada setiap wilayah atau daerah yang berbeda-beda. Sejak tahun 2001, Indonesia telah secara bertahap menerapkan sistem desentralisasi fiskal dalam membantu perekonomian daerah-daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal yang dapat dilihat.

Transfer dari pusat dalam bentuk dana dalam rangka perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum terus-menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan dana perimbangan selain berdampak baik untuk perekonomian, juga mencerminkan ketergantungan fiskal terhadap dana pemerintahan pusat. Bahkan mayoritas dana di daerah adalah dana perimbangan yang kurang lebih 80 persen dari total penerimaan daerah. Dana perimbangan berupa dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil menunjukkan *trend* peningkatan selama tahun ke tahun. Selama desentralisasi fiskal pada tahun 2001, dana perimbangan Sulawesi Selatan sebesar Rp328,705,760,000 terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp5,395,232,629,887. Hal ini sebanding dengan kesenjangan yang terjadi peningkatan pula terdapat pada 19 tahun terakhir.

Adanya dana transfer untuk daerah adalah berupa dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), memungkinkan daerah-daerah otonomi untuk memiliki sumber dana dalam membangun ekonominya masing-masing. Pembangunan itu dapat dikatakan berhasil jika suatu daerah

dapat melakukan peningkatan ekonomi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Salah satu faktor kemajuan sebuah wilayah dapat dilihat salah satunya dari kualitas sumber daya manusia. Melalui Indeks Pembangunan Manusia setiap wilayah tidak hanya melihat kuantitas namun juga dapat melihat kualitas karena IPM merupakan indeks komposit dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan *representative*.

Indeks Pembangunan Manusia provinsi Sulawesi Selatan dalam 19 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2002, IPM Sulawesi Selatan berterdapat terdapat angka 65,3 dan terjadi peningkatan sebesar 72 pada tahun 2020. Namun, kesenjangan yang diukur dalam indeks Williamson juga mengalami kenaikan pada tahun 2002 sebesar 0,54 menjadi 0.69 pada tahun 2020. Ironisnya, meskipun peningkatan kualitas sumber daya manusia terus terjadi peningkatan dalam 19 tahun terakhir, namun belum mampu mengurangi kesenjangan yang ikut melebar.

Pola kenaikan upah minimum di Sulawesi Selatan dapat dijelaskan selama 19 tahun terakhir. Tahun 2002 upah minimum Sulawesi Selatan sebesar Rp300 ribu, selanjutnya terjadi peningkatan hingga Rp3,1 juta terdapat 2020. Sementara itu, kesenjangan yang diukur dengan Indeks Williamson juga mengalami kenaikan selama 19 tahun terakhir. Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong adanya pemerataan atas distribusi pendapatan terhadap masyarakat, namun kenaikan upah pada setiap tahunnya juga dibarengi dengan kenaikan ketimpangan pada pendapatan yang relatif.

Kajian ini ditujukan untuk meninjau variabel dana perimbangan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap ketimpangan pada pendapatan baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung melalui perbaikan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara spesifik, kajian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Seberapa besar pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap ketimpangan pada pendapatan baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.
2. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pada pendapatan baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.

3. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pada pendapatan baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini mencakup ketimpangan pada pendapatan yang diukur dengan indeks williamson yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2002-2020. Ketimpangan pada pendapatan dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu dalam kurun waktu 2002-2020. Variabel ini diperoleh dari teori serta kajian terdahulu dan variabel yang dipilih menggambarkan kemajuan perekonomian, kemajuan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan di Sulawesi Selatan yaitu perbaikan perekonomian, dana perimbangan, indeks pembangunan manusia dan upah minimum. Berdasarkan teori dan kajian, maka dipilih variabel yang dapat menjelaskan kondisi ketimpangan pada pendapatan di Sulawesi Selatan. Adapun variabel independen dan dependen sekaligus menjadi variabel intervensi yang dipilih adalah:

1. Dana Perimbangan (X_1)
2. Indeks Pembangunan Manusia (X_2)
3. Upah Minimum (X_3)
4. Pertumbuhan perekonomian (Z)

Variabel-variabel tersebut didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik, Kemenkeu, dan Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Sulawesi Selatan tahun 2002-2020. Data indeks williamson yang digunakan dalam kajian ini adalah data yang dihitung sendiri dengan menggunakan rumus perhitungan indeks williamson, sebagai berikut;

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{P_i}{P}}}{\bar{y}}$$

Keterangan:

CV = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah

y_i = PDRB perkapita kabupaten/kota ke-i (rupiah)

\bar{y} = Rata-rata PDRB perkapita provinsi (rupiah)

Pi = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i (jiwa)

P = Jumlah penduduk provinsi (jiwa)

Kajian ini ditujukan melihat pengaruh relasi antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara. Variabel dependen dalam kajian ini adalah ketimpangan pada pendapatan, sedangkan variabel independen dalam kajian ini adalah dana perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah minimum, serta variabel perantara adalah perbaikan perekonomian.

Untuk melihat sejauh mana dana perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upah minimum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan melalui pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, kajian ini menggunakan model persamaan *Structural Equation Model* (SEM). *Structural Equation Model* digunakan untuk mencari relasi langsung dan tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, penggunaan *Structural Equation Model* dalam kajian ini sudah tepat karena kajian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel.

Model persamaan yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

$$Z = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} X_3^{\alpha_3} e^{(\alpha_2 X_2 + \mu_1)} \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} Z^{\beta_4} e^{(\beta_2 X_2 + \mu_2)} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana α_0 dan β_0 adalah konstanta, sementara α_1 , α_2 , α_3 dan β_1 , β_2 , β_3 adalah masing-masing parameter yang akan diestimasi. Adapun μ_1 dan μ_2 adalah *random errors*. Persamaan (3) dan (4) merupakan persamaan non-linear. Maka untuk memperoleh nilai elastisitasnya diubah menjadi persamaan linear dengan menggunakan logaritma natural (Ln), sehingga persamaannya menjadi:

$$Z = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \text{Ln}X_3 + \mu_1 \dots\dots\dots(3)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 Z + \mu_2 \dots\dots\dots(4)$$

Substitusi persamaan (3) kedalam persamaan (4):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 Z + \mu_2$$

$$\begin{aligned}
 &= \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 (\alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \text{Ln}X_3 + \mu_1) + \mu_2 \\
 &= \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 \alpha_0 + \beta_4 \alpha_1 \text{Ln}X_1 + \beta_4 \alpha_2 X_2 + \beta_4 \alpha_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 \mu_1 + \mu_2 \\
 &= (\beta_0 + \beta_4 \alpha_0) + (\beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_4 \alpha_1 \text{Ln}X_1) + (\beta_2 X_2 + \beta_4 \alpha_2 X_2) + (\beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 \alpha_3 \text{Ln}X_3) + (\beta_4 \mu_1 + \mu_2) \\
 &= (\beta_0 + \beta_4 \alpha_0) + (\beta_1 + \beta_4 \alpha_1) \text{Ln}X_1 + (\beta_2 + \beta_4 \alpha_2) X_2 + (\beta_3 + \beta_4 \alpha_3) \text{Ln}X_3 + (\beta_4 \mu_1 + \mu_2)
 \end{aligned}$$

Maka *reduced form* persamaan simultannya diperoleh sebagai berikut:

$$Y = \delta_0 + \delta_1 \text{Ln}X_1 + \delta_2 X_2 + \delta_3 \text{Ln}X_3 + V$$

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Uji statistik hasil pengolahan dengan SEM menggunakan program Software *Amos*, maka diagram jalur yang dibuat dikonversi ke persamaan struktural, selanjutnya akan dilakukan analisis berdasarkan nilai estimasi dan probabilitas atau signifikansi variabel terkait Dana perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan pada pendapatan melalui pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai 2020. Berikut output *regression weights* hasil analisis yang menunjukkan pengaruh besaran nilai probabilitas variabel independen terhadap variabel dependen:

Tabel 1. Estimasi Regression Weights Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pembangunan Perekonomian, dan Ketimpangan Pendapatan

Dependent		Independent	Estimate	S.E.	C.R.	P	Keterangan
Z	<---	X1	9,430*	2,215	4,258	***	Positif Signifikan
Z	<---	X2	-,488*	,216	-2,260	,024	Negatif Signifikan
Z	<---	X3	-7,995*	2,148	-3,721	***	Negatif Signifikan
Y	<---	X1	,014 ^{ns}	,074	,193	,847	Tidak Signifikan
Y	<---	X2	,018*	,006	3,165	,002	Positif Signifikan
Y	β-	X3	-,027 ^{ns}	,068	-,397	,691	Tidak Signifikan
Y	β-	Z	,008 ^{ns}	,006	1,391	,164	Tidak Signifikan
Square Multiple Regression							
							Estimate
Pertumbuhan Ekonomi							0,550
Ketimpangan Pendapatan							0,485

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil yang diilustrasikan terdapat tabel 1 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi atau R-Square dari perbaikan perekonomian yaitu sebesar 0,550, berarti 55 persen variasi perubahan pertumbuhan perekonomian dapat dijelaskan oleh variabel dana perimbangan, indeks pembangunan manusia dan upah minimum, sedangkan sisanya sebesar 45 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil kajian menunjukkan nilai koefisien determinasi dari ketimpangan pada pendapatan yaitu sebesar 0,485, berarti 48,5 persen variasi perubahan ketimpangan pada pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan dana perimbangan, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan pertumbuhan perekonomian, sedangkan sisanya sebesar 51,5 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Terdapat Tabel 1 dapat dilihat bahwa pengaruh variabel independen terhadap dependen bervariasi, contohnya hasil estimasi pengaruh dana perimbangan (X1) terhadap perbaikan perekonomian memiliki nilai probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0,000 dan koefisien regresinya sebesar 9,430 terdapat tingkat signifikansi 5 persen, menunjukkan dana perimbangan dengan cara yang langsung memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian dan ketika terjadi peningkatan dana perimbangan sebesar 1 persen maka akan melakukan peningkatan ekonomi sebesar 9,430 persen. Sedangkan hasil estimasi pengaruh dengan cara yang langsung dana perimbangan (X1) terhadap ketimpangan pada pendapatan (Y) yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,847 dan koefisien regresi sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh dengan cara yang langsung terhadap ketimpangan pada pendapatan. Maka, berapapun perubahan yang terjadi terdapat dana perimbangan tidak akan memengaruhi ketimpangan pada pendapatan.

Selanjutnya terdapat Tabel 1, estimasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap pertumbuhan perekonomian (Z) memiliki nilai probabilitas atau tingkat signifikansi sebesar 0,024 serta koefisien regresinya sebesar -0,488 yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa, ketika indeks pembangunan manusia naik 1 persen maka akan mengurangi pertumbuhan perekonomian sebesar 0,488 persen. Sedangkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap ketimpangan pada pendapatan (Y) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,002 dan koefisien regresinya sebesar 0,018, nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (X2) dengan cara yang langsung memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pada pendapatan (Y), dimana saat

Indeks Pembangunan Manusia naik 1 persen akan meningkatkan kesenjangan sebesar 0,018 persen.

Terdapat Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa hasil estimasi pengaruh upah minimum (X_3) terhadap pertumbuhan perekonomian (Z) memiliki nilai probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar -7,995. Nilai probabilitas sebesar 0,000 memiliki arti bahwa upah minimum (X_3) dengan cara yang langsung memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian (Z) terdapat tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketika upah minimum naik 1 persen, maka akan mengurangi pertumbuhan perekonomian sebesar 7,995 persen. Adapun hasil estimasi pengaruh upah minimum (X_3) terhadap ketimpangan pada pendapatan (Y) yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,691 dengan koefisien regresi sebesar -0,027 menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pada pendapatan tidak memiliki pengaruh dengan cara yang langsung, sebab angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5 persen. Dan berapapun kenaikan upah minimum tidak akan mengurangi ketimpangan pada pendapatan.

Tabel 1 juga memperlihatkan hasil estimasi pertumbuhan perekonomian (Z) terhadap ketimpangan pada pendapatan (Y) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,164 dan koefisien regresi sebesar 0,008 yang memiliki arti bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian terhadap ketimpangan pada pendapatan tidak memiliki pengaruh terdapat tingkat signifikansi 5 persen, sehingga disimpulkan bahwa pertumbuhan perekonomian tidak memiliki pengaruh dengan cara yang langsung terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan perekonomian.

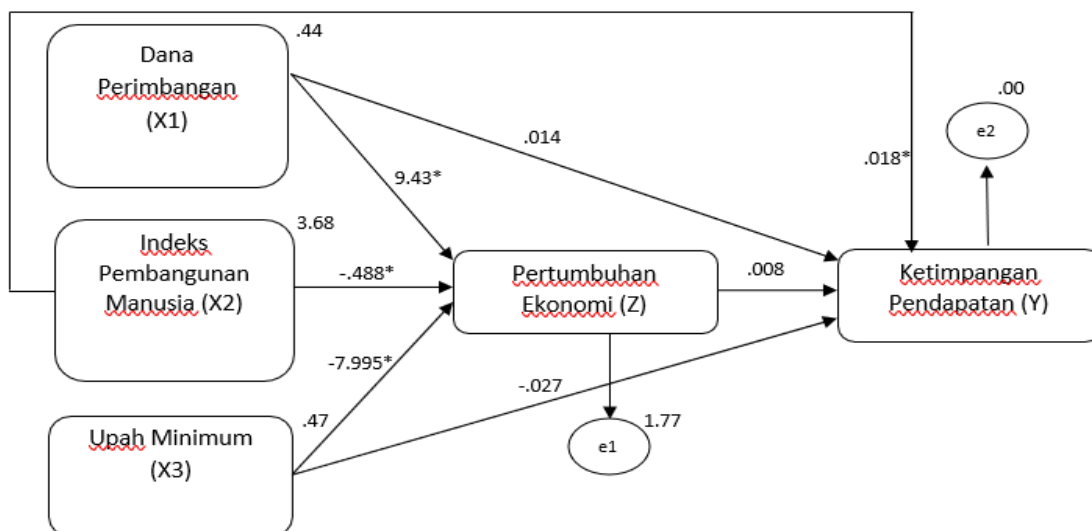
Tabel 2. Hasil Estimasi Koefisien Variabel Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Pengaruh

Variabel	Pengaruh Langsung (direct effect)				Pengaruh Tidak Langsung (indirect effects)	Total Pengaruh
	X1	X2	X3	Z	Y	Y
X1	0	0	0	0	0,073 ^{ns}	0,088 ^{ns}
X2	0	0	0	0	-0,004 ^{ns}	0,015 ^{ns}
X3	0	0	0	0	-0,062 ^{ns}	-0,089 ^{ns}
Z	9,430*	-0,488*	-7,995*	0	0	0,008 ^{ns}
Y	0,014 ^{ns}	0,018*	-0,027 ^{ns}	0,008 ^{ns}	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diilustrasikan diagram analisis jalur antar variabel bagaikan berikut:

Gambar 1. Gambar Diagram Analisis Jalur Antar Variabel



*Keterangan: besaran pengaruh variable independent terhadap variabel dependen terdapat tingkat signifikansi 5 persen. Sumber: IBM SPSS Amos 22

Berdasarkan hasil analisis statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh dengan cara yang langsung terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2002 sampai 2020. Hasil

ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi terdapat variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya perubahan yang terjadi pada variabel ketimpangan pada pendapatan.

Hal ini dikarenakan oleh kemampuan atau kapasitas fiskal daerah khususnya kabupaten/kota belum memadai dalam membantu membiayai kebutuhan belanja daerah dalam APBD sehingga hal ini masih terus mengakibatkan ketergantungan yang sangat besar terhadap transfer fiskal dari pusat. Perkembangan dana perimbangan selama 19 tahun dari 2002 hingga 2020 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, begitu pula transfer ke daerah kabupaten/kota yang terus menerus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang dari transfer pusat.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020

Tahun	Pendapatan daerah	PAD	Transfer pusat
2016	7,162,588,691,183.00	3,449,561,308,105.00	3,699,816,673,661.00
2017	9,055,278,907,514.00	3,679,083,943,914.00	5,354,507,388,022.00
2018	9,252,221,942,175.45	3,948,349,252,423.45	5,287,519,277,687.00
2019	9,573,910,861,960.70	4,138,631,215,914.70	5,388,320,704,592.00
2020	9,365,471,515,325.67	3,890,209,264,433.67	5,395,232,629,887.00

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2022

Tabel di atas merupakan realisasi penerimaan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan total pendapatan daerah yang berasal dari PAD, transfer pusat dan lainnya setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dimana PAD Sulawesi Selatan mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*. Selain itu peningkatan ekonomi transfer pusat pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 dikarenakan anggaran nasional lebih diprioritaskan untuk pemulihan nasional. Jika ditelaah lebih dalam, penerimaan pendapatan daerah lebih didominasi oleh transfer pusat sedangkan PAD tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam buku kajian fiskal regional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, rasio kemandirian Sulsel pada tahun 2020 sebesar 21,08 persen, mengalami peningkatan 2,84 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, angka rasio di Sulawesi Selatan masih menunjukkan pola relasi instruktif dimana peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau pemerintah Sulawesi Selatan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Pembangunan infrastruktur juga belum mampu mencerminkan penurunan kesenjangan meskipun dana alokasi khusus terus mengalami peningkatan dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada tahun 2020 misalnya, Sulawesi Selatan kerap kali menjadi penerima terbesar bagi transfer alokasi khusus baik fisik maupun non-fisik di wilayah Sulawesi. Selain itu tidak memiliki pengaruhnya dana perimbangan terhadap kesenjangan daerah memberikan informasi bahwa rata-rata total realisasi dana perimbangan terbesar terdapat terdapat dana alokasi umum yang dimana dipergunakan lebih banyak untuk membayar gaji pegawai. Pada tahun 2019 misalnya, rancangan anggaran pendapatan dan belanja provinsi Sulawesi Selatan untuk belanja pegawai sebesar sepertiga dari total penerimaan, sedangkan realisasi untuk anggaran belanja sebesar sepertiga dari total penerimaan. Tidak hanya itu, dari tingkat penyerapan realisasi untuk anggaran belanja Pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dengan porsi 42,79 persen dibandingkan dengan belanja barang sebesar 17,31 persen. Hasil kajian ini memiliki kontradiksi dengan teori yang mana menunjukkan bahwa dana perimbangan idealnya mampu menurunkan kesenjangan, sebagaimana tujuan dari desentralisasi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan masih memiliki tugas berat terkait dengan pembangunan dan dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, melalui variabel pembangunan perekonomian, dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan di Pulau Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2002 sampai 2020. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang didominasi oleh sektor padat modal bagaikan infrastruktur yang menggunakan alat-alat produksi yang selanjutnya sektor ini lebih mengutamakan modal dibandingkan tenaga kerja, dan juga setiap peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa tidak melibatkan seluruh elemen atau golongan masyarakat agar turut andil dalam proses penciptaan output tersebut sehingga tidak mempengaruhi penurunan ketimpangan pada pendapatan.

Hasil analisis statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memberikan pengaruh positif dengan cara yang langsung terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2002 sampai 2020. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia justru menyebabkan peningkatan angka ketimpangan pada pendapatan di Sulawesi Selatan, dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka distribusi pendapatan semakin timpang. Hasil kajian ini tidak sesuai dengan kajian Hartini (2017)⁹ bahwa hasil kajian menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pada pendapatan. Hasil ini juga tidak sesuai dengan studi Becker, bahwa pembangunan manusia berkaitan erat dengan kesenjangan. Becker meninjau lebih dalam mengenai peran serta pendidikan formal untuk menunjang pertumbuhan perekonomian, menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula.

Idealnya, Indeks Pembangunan Manusia harus berbanding terbalik dengan ketimpangan pada pendapatan, dimana Indeks Pembangunan Manusia dapat menurunkan ketimpangan pada pendapatan. Akan tetapi, sejauh yang dapat ditelusuri, kasus ini tidak hanya dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga dialami oleh beberapa provinsi di Indonesia, sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Ramadhan (2020)¹⁰ dan Ginting (2020)¹¹. Relasi Indeks Pembangunan Manusia dengan ketimpangan pada pendapatan juga menjadi perhatian Todaro dan Smith (2006)¹². Mereka berpendapat bahwa pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih rendah dalam pembangunan manusia. Tetapi kesenjangan yang terjadi pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan, dan tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia di berbagai daerah bisa menyebabkan terdapat daerah tertentu akan lebih maju karena kualitas sumber daya manusia yang ada. Pandangan Todaro dan Smith di atas tampaknya lebih relevan untuk menjelaskan kondisi paradoksal untuk relasi antara Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan pada pendapatan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Melalui variabel pembangunan perekonomian, Indeks Pembangunan Manusia tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2002 sampai 2020. Secara keseluruhan hasil kajian ini menunjukkan bahwa besarnya perubahan untuk Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan menurunkan angka peningkatan ekonomi dan di sisi lain tidak memberikan pengaruh

terhadap perubahan ketimpangan pada pendapatan di Sulawesi Selatan. Kajian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dan I Ketut (2017)¹³ bahwa IPM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Bali. Namun hasil kajian ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Nu'man Nur (2021)¹⁴ yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi.

Pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber daya, baik kaitannya dengan teknologi maupun sarana lainnya untuk mencapai pertumbuhan perekonomian. Peningkatan pembangunan manusia tidak memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap ketimpangan pada pendapatan, karena peningkatan pembangunan manusia belum berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian, sehingga pertumbuhan perekonomian yang cenderung menurun. Agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat harus didukung adanya efisiensi dalam proses produksinya sehingga memungkinkan bagi perekonomian untuk berproduksi lebih maksimal (Subandi, 2016). Tingginya kualitas manusia diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap proses produksi sehingga dapat menghasilkan peningkatan produktivitas baik dalam bidang jasa maupun barang, sehingga dapat menaikkan total PDRB. Rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama 19 tahun terakhir yaitu 68,74 termasuk kategori indeks sedang dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan meskipun derajatnya sangat kecil terlebih perhitungan atau metode dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia berubah pada tahun 2010.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia bukan suatu proses yang pendek namun berlangsung dalam jangka panjang dan perlu interaksi beberapa komponen sektor lainnya. Karenanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dalam 19 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan tidak serta merta menunjukkan dampak dengan cara yang langsung terhadap perekonomian dan melalui mekanisme itu tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan kesenjangan.

Hasil estimasi variabel upah minimum dengan cara yang langsung tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2002 hingga 2020. Hasil tersebut juga menyatakan bahwa kenaikan upah minimum baik di

tingkat regional maupun provinsi tidak memiliki dampak terhadap pengurangan indeks williamson di provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh pelaku swasta yang belum sepenuhnya menerapkan upah minimum terhadap gaji karyawan terdapat perusahaannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan tenaga kerja. Di Sulawesi Selatan, hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang menerapkan adanya Upah Minimum Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Luwu Timur, yang menunjukkan adanya kemandirian daerah dalam menetapkan upah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Adapun 21 daerah lainnya mengikuti standar pengupahan provinsi atau UMP. Sejak tahun 2002 hingga 2020, upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak dibarengi oleh penurunan kesenjangan. Meskipun standar pengupahan oleh sektor regional yang belum menetapkan UMK masih mengikuti standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah provinsi, nyatanya masih banyak yang tidak menjadikan Upah Minimum Provinsi sebagai acuan dalam penetapan gaji, sehingga belum mampu menurunkan kesenjangan pendapatan.

Selain itu, Sulawesi Selatan memiliki status lumbung pangan ke-4 setelah daerah di pulau jawa, yang artinya lahan pertanian yang dimiliki sangat luas dan mengalami surplus salah satunya beras, sehingga banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Adapun sektor industri hanya terdapat pada daerah tertentu, sehingga kenaikan upah hanya dirasakan pekerja terdapat sektor industri dalam wilayah tertentu. Di sisi lain, kenaikan upah justru tidak mempengaruhi dan dirasakan oleh pekerja terdapat sektor pertanian. Seharusnya kenaikan upah minimum dapat mengurangi kesenjangan, tetapi upah yang senantiasa terjadi peningkatan justru tidak mensejahterakan masyarakat.

Hasil kajian ini berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Istihkarah., dkk (2018)¹⁵ bahwa upah minimum memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 hingga 2018. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai UMK tidak menjamin dapat meningkatkan nilai pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta UMK tidak mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Juga sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Hartini (2019)¹⁶ bahwa nilai UMK tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pada pendapatan di Jawa Timur tahun 2012-2015.

Melalui variabel pertumbuhan perekonomian, upah minimum tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2002 sampai 2020. Secara keseluruhan hasil kajian ini menunjukkan bahwa besarnya perubahan terdapat upah minimum di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menurunkan angka peningkatan ekonomi dan pada sisi lain tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan ketimpangan pada pendapatan di Sulawesi Selatan.

Hasil kajian yang menunjukkan upah minimum memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan perekonomian ini sesuai dengan teori *Cost Push Inflation*. Menurut Todaro (2006)¹⁷, kenaikan upah akan mendorong *aggregate supply* ke kiri atas, sehingga berakibat terdapat perusahaan. Konsekuensinya perusahaan akan menaikkan biaya atau *cost* akibat kenaikan upah dan berdampak terdapat penurunan daya beli atau permintaan masyarakat sehingga perusahaan akan menurunkan tingkat produksinya. Kenaikan upah yang terdapat dasarnya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenaikan upah akan meningkatkan biaya produksi, sehingga harga barang naik dan selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, perusahaan akan menurunkan tingkat produksi akibat terjadi inflasi. Oleh karena itu, meskipun kenaikan upah berdampak negatif terhadap peningkatan ekonomi, inflasi yang sulit dikontrol tetap tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan kesenjangan akibat keadaan yang stagnan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, maka kesimpulan studi ini sebagai berikut: 1) dana perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak menunjukkan pengaruh dengan cara yang langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pada pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan yang terjadi terdapat dana perimbangan justru tidak akan memperlebar ataupun mengurangi ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 hingga 2020; 2) Indeks Pembangunan Manusia dengan cara yang langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pada pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan yang terjadi terdapat Indeks Pembangunan Manusia akan memperlebar ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, begitupun sebaliknya akan terjadi relasi paralel. Namun, secara tidak

langsung melalui pertumbuhan perekonomian, Indeks Pembangunan Manusia tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2002 hingga 2020; 3) upah minimum dengan cara yang langsung tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan dan secara tidak langsung tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pada pendapatan melalui pertumbuhan perekonomian.

Hasil studi ini merekomendasikan beberapa hal: 1) pemerintah diharapkan dapat memperhatikan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta upaya mengembangkan sumber daya alam sehingga pembangunan lebih adil dan merata sebagaimana alokasi dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum agar terfokus terdapat belanja modal yang selanjutnya menstimulus adanya pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas; 2) dengan melihat kesenjangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan adanya campur tangan pemerintah dan juga kebijakan untuk mengembangkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, khususnya terdapat pendidikan; 3) upah minimum merupakan hal yang sangat penting dalam tenaga kerja, sebab tingginya upah minimum di suatu daerah akan mendorong pendatang dan menjadi tolak ukur kesejahteraan pekerja. Namun, terdapat penetapan upah minimum, pemerintah diharap menyesuaikan dengan peningkatan ekonomi daerah dan tingkat harga. Sebab, kenaikan upah yang dibarengi dengan inflasi yang tidak stabil akan tetap tidak terjadi peningkatan upah *real* terdapat pekerja. Legislasi juga harus mempersiapkan seperangkat regulasi sistem kontrol untuk menjalankan peraturan upah minimum secara efektif di setiap sektor termasuk sektor formal dan informal, sehingga kesenjangan upah antara sektor formal dan informal perlu disesuaikan besaran nominalnya. Hal ini diharapkan akan meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja yang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang selanjutnya akan menekan ketimpangan pada pendapatan.

REFERENSI

- [1] Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi pembangunan. Edisi kelima*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- [2] Dao Minh Quang. 2013. *Factor Endowment, Human Capital, and Inequality in Developing Countries*. *Journal of Economic Studies*, 40(1): p:98-106. Eastern Illinois

- University .USA.
- [3] Yang dan Greaney. 2017. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Asia-Pasifik: Studi Banding Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat*.
- [4] Lundberg dan Squire. 2003. *Evolusi Pertumbuhan dan Ketimpangan Secara Simultan*. Jurnal Ekonomi
- [5] Wahiba dan El Weriemmi. 2014. *Hubungan antara pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan*.
- [6] Panizza, Ugo. 2002. *Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- [7] Yuniasih dan Korimah. 2019. *Desentralisasi Fiskal Dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota DI Sulawesi Selatan: Implementasi Tujuan SDG's Ke-10*.
- [8] Kuznets, Simon. 1971. *Economic Growth of Nations*. Harvard Levitan dan Richard Belous. Cambridge
- [9] Trihartini, Nita. 2017. *Pengaruh PDRB per Kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- [10] Ramadhan, Izhur Maulana S. 2020. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2017*. Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya.
- [11] Ginting, Desi Putri Utami BR. 2020. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara
- [12] Todaro dan Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta
- [13] Ni Putu Sri dan I Ketut Sustrina. 2017. *Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud, 10 [5] : 2193 – 2222. ISSN 2303-017.
- [14] Nu'man Nur Andriani. 2021. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi*
- [15] Istikharoh dkk. 2018. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa*

- Yogyakarta Tahun 2008-2018*. Fakultas Ekonomi Univ. Tidar, Magelang.
- [16] Hartini, Ermatry. 2019. *Analisis Faktor-factor yang mempengaruhi pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur 2012-2015*. Univ. Wijaya Kusuma. Surabaya.
- [17] Todaro dan Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta